

PERAN PEMERINTAH DESA PIMPING DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR PADA KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN

Miskiah¹, Agus Sya'bani Arlan², Mahdalina³

Program Studi Alministras Publik

Sekolah Tinggi Ilmu administrasi (STIA) Amuntai

e-mail : Miskiah09@gmail.com

ABSTRAK

Bentuk peran pemerintah desa salah satunya adalah penanggulangan bencana alam seperti banjir. Tujuan penelitian untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Pimping Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Pada Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Teknik dalam penarikan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah 12 orang dan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa Pimping Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Pada Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan belum optimal dari. *Pertama*, Regulator, membantu mengatasi masalah sudah berjalan optimal, indikator memfasilitasi kebutuhan guna penanganan banjir belum optimal. *Kedua*, sub variabel dinamisor, indikator sebagai agen mempercepat perubahan pemerintah desa belum optimal. indikator sebagai peningkatan inovasi belum optimal. *Ketiga*, sub variabel fasilitator, indikator sebagai sarana dan prasarana belum optimal dan ndikator sebagai penyediaan penyuluhan belum optimal. *Keempat*, sub variabel katalisator dengan indikator sebagai respon berbagai keluhan sudah optimal dan indikator koordinasi multi pihak sudah optimal. Faktor pendukung antara lain : tanggung jawab sosial dan penguatan kualitas pelayanan. Dan penghambat yaitu : Keterbatasan anggaran kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Disarankan Kepada Kepala Desa Pimping agar dapat membuat perencanaan dengan memaksimalkan anggaran yang ada untuk penanggulangan bencana banjir. Kepada Kasi Kesejahteraan agar lebih memaksimalkan peranannya dan masyarakat penting memiliki kesadaran akan risiko banjir dan dampaknya bagi kehidupan.

Kata Kunci : Peran, Pemerintah Desa, Bencana Banjir

ABSTRACT

One of the roles of village government is managing natural disasters such as floods. The aim of the research is to determine the role of the Pimping Village Government in managing flood disasters in Lampihong District, Balangan Regency. This research method uses a qualitative approach with a qualitative descriptive research type. The technique for attracting informants in this research used a purposive sampling technique with a total of 12 people and data collection techniques, namely interviews, observation and documentation. The results of the research show that the role of the Pimping Village Government in managing flood disasters in Lampihong District, Balangan Regency has not been optimal. First, the Regulator, helping to overcome problems has been running optimally, the indicators for facilitating needs for flood management are not yet optimal. Second, the dynamic sub-variable, the indicator as an agent for accelerating change in village government, is not yet optimal. indicators for increasing innovation are not yet optimal. Third, the facilitator sub-variable, indicators as facilities and infrastructure are not optimal and indicators as providing counseling are not optimal. Fourth, the catalyst sub-variable with indicators in response to various complaints is optimal and the multi-party coordination indicator is optimal. Supporting factors include: social responsibility and strengthening service quality. And the obstacles are: Budget limitations, lack of community awareness and participation. It is recommended that the Head of Pimping Village make plans to maximize the existing budget for flood disaster management. For the Head of Welfare Section to maximize their role and it is important for the community to have awareness of the risk of flooding and its impact on life.

Keywords: Role, Village Government, Flood Disaster

PENDAHULUAN

Banjir merupakan fenomena yang hampir selalu terjadi setiap tahun di seluruh dunia. Bencana banjir Balangan yang merendam beberapa Kecamatan diantaranya Kecamatan Lampihong. Pentingnya suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) dan tanggul penghambat atau cekdam digunakan sebagai unit perencanaan penanggulangan banjir yang utuh merupakan konsekuensi logis untuk menjaga kesinambungan pemanfaatan sumber hutan, tanah, dan air. Kurang tepatnya perencanaan dapat menimbulkan adanya degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dapat menimbulkan banjir sehingga berdampak negatif bagi masyarakat seperti yang di kemukakan di atas. Dalam upaya menciptakan pendekatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu, diperlukan perencanaan secara menyeluruh, berkelanjutan dan berwawasan dalam pengelolaan lingkungan dengan mempertimbangkan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai unit pengelolaan untuk beberapa desa tertentu diantaranya Desa Pimping dan desa-desa lain yang ada di kecamatan Lampihong.

Bila bencana banjir tiba penanggulangannya dapat dilakukan secara menyeluruh yang meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) mulai daerah hulu sampai hilir. Mengingat Kabupaten Balangan yang rawan bencana banjir pada tahun- tahun sebelumnya, maka Pemerintah Kabupaten Bantaeng berusaha segera mengambil tindakan-tindakan yang tepat tentang penanggulangan bencana banjir tersebut, sesuai otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk menanggulangi bencana banjir yang terjadi di daerah-daerah tertentu.

Sebelumnya banjir bandang pernah melanda sebagian besar wilayah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Banjir bandang itu melanda pada tanggal 15/11/2021 sampai 18/11/2021 menyebabkan ratusan rumah terendam air dan sebagian warga mengungsi, permukiman warga, juga sejumlah area persawahan. Salah satu desa yang terdampak banjir pada kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan yaitu Desa Pimping. Balangan berada dalam posisi siaga 1 untuk menanggulangi dampak banjir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan membentuk posko induk di setiap desa yang terdampak banjir di Kabupaten Balangan. Sejumlah posko relawan juga dibentuk oleh beragam organisasi kemasyarakatan untuk menyalurkan bantuan kepada korban banjir ini.

Pemerintah Daerah Peraturan Bupati Balangan (Perbub) telah menetapkan Undang-undang Nomor 73 Tahun 2021 tentang penanggulangan bencana mengidentifikasi hal tersebut sebagai bencana, yang artinya serangkaian kejadian yang mengganggu dan mengancam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non alam dan faktor masyarakat sehingga peran pemerintah Desa Pimping dalam menurunkan resiko banjir melalui Kampung Siaga Bencana yang memiliki empat indikator meliputi peran pemerintah sebagai regulator, peran pemerintah sebagai dinamisator, peran pemerintah sebagai fasilitator dan peran pemerintah sebagai katalisator.

Bentuk peran pemerintah desa Pimping dalam penanggulangan bencana banjir selama ini mereka sudah membuat sebuah peta yang mana daerah tersebut menjadi daerah yang sangat rawan banjir. Lalu mereka saling berkoordinasi dengan dinas terkait tentang penanggulangan bencana daerah tentang bagaimana cara mengatasi permasalahan banjir yang ada pada desa Pimping kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. Sejauh ini peran pemerintah desa sudah bekerja secara maksimal dalam mengatasi permasalahan tersebut salah satunya dengan mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam menghadapi bencana. Desa Pimping juga sudah merumuskan perihal kebijakan penanggulangan bencana banjir dan mereka sudah memberikan bantuan bagi warga yang terdampak banjir.

Berdasarkan hasil observasi maka dengan ini dapat diketahui bahwa ada beberapa fenomena masalah pada Pemerintah Desa Pimping dalam penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Sebagai berikut:

1. Tidak adanya sungai besar pada desa Pimping sebagai penyaluran air.
Sungai besar merupakan tempat aliran sungai yang dapat menormalkan dalam peningkatan kapasitas untuk menampung dan mengalirkan air hujan yang ada dengan baik. (Sumber: Berdasarkan letak geografis desa Pimping 2024).
2. Belum optimalnya pembangunan dalam penanggulangan banjir. Seperti belum adanya fasilitas jalan yang tinggi untuk warga yang terdampak banjir sehingga banjir belum dapat teratasi dengan baik. (Sumber: Berdasarkan Keterangan dari Kepala Desa Pimping 2024).
3. Belum adanya pengawasan oleh pemerintah desa. Seperti tidak dilakukannya perbaikan saluran air. Sebagian masyarakat menganggap bahwa saluran air adalah tempat pembuangan sampah. Padahal saluran air merupakan jalan air yang harus berfungsi pada waktu hujan mengalirkan kelebihan air. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan langsung oleh kepala desa terhadap masyarakat dalam kebersihan lingkungan dan menjaga saluran air agar kedepannya bencana banjir dapat teratasi dengan baik. (Sumber: Berdasarkan hasil keterangan dari warga desa Pimping 2024).

Administrasi Publik

Administrasi publik ialah ilmu sosial yang mengkaji sistem ketatanegaraan suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan publik yang mencakup organisasi publik, kebijakan publik, manajemen publik, dan pelayanan publik. Administrasi publik sama halnya dengan administrasi lainnya yang dijalankan untuk serangkaian kepentingan umum. Sehingga, dalam administrasi publik terdapat definisi yang cukup beragam dan dari berbagai macam ahli.

Keban (2017:29) "Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya sumber daya dan personal publik diorganisir untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan dalam kebijakan publik".

Anggara (2016:2) "Administrasi publik dalam arti luas dapat dilihat tiga sudut, yang meliputi tiga pengertian proses, fungsi dan kelembagaan". Yaitu sebagai berikut:

1. Dari segi proses, administrasi adalah keseluruhan proses berpikir, memutuskan, menetapkan tujuan, dan melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Dari sudut pandang fungsi, administrasi adalah aktivitas kolektif yang dilakukan secara sadar oleh setiap individu atau kelompok yang bertindak sebagai manajer atau administrator. Kegiatan-kegiatan tersebut memiliki jenis tugas kerja (fungsi) yang berbeda-beda misalnya tugas perencanaan, tugas organisasi, tugas pergerakan, tugas pemantauan, dan lain-lain.
3. Dari sudut kelembagaan administrasi dilihat dari sudut pandang baik individu maupun kelompok, yang melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Orang-orang ini dibagi menjadi empat kelompok:
 - a. Administrator: Orang yang menentukan dan mempertahankan tujuan.
 - b. Manajer: Orang yang memimpin pekerjaan kearah tercapainya hasil yang diinginkan.
 - c. Pembantu ahli (staf): meliputi para ahli dalam setiap bidang, selaku penasehat dan berfungsi di bidang pemikiran.
 - d. Karyawan: Para pelaksana dan pekerja yang digerakkan oleh manajer untuk bekerja, guna menghasilkan target sesuai dengan tujuan.

Konsep Peran

Secara etimologi peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan dengan kedudukannya, dapat dikatakan bahwa orang tersebut menjalankan suatu peranan-peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan.

Menurut Robbins dan Judge dikutip dalam Saraswati dan Sirait (2015:182) ‘Mengatakan bahwa peran adalah suatu rangkaian pola pada perilaku yang dihadapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu unit sosial’.

Menurut Soejono Soekanto (2017:221) "Peran lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi tepatnya adalah seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu perannya".

Menurut Poedarminta (2015:571), Peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Maksud dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan dan dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat.

Menurut Rahayu (2019:7) "Peran ialah suatu kedudukan yang diungkapkan oleh seseorang kepada masyarakat luas dimana seseorang tersebut mengungkapkan fungsi awal di kedudukan tersebut dimana posisi tersebut masih berstruktur sosial. Terdapat dua paham yang digunakan dalam mengartikan peran ini yaitu paham strukturalisasi dan interaksi. Paham strukturalisasi adalah kaitan antara peran sebagai kebudayaan pada hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh sistem budaya disuatu daerah tertentu".

Dalam UU No 24 Tahun 2007, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diantaranya:

- a. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.
- b. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai.
- c. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Selain tanggung jawab, Pemerintah Daerah juga mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi:
 - 1) Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan atau kabupaten atau kota lain.
 - 2) Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
 - 3) Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya.
 - 4) Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan atau kabupaten atau kota lain.
 - 5) Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten atau kota.
 - 6) Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya

bencana pada wilayahnya.

Beberapa pendapat dan teori Peran Pemerintah yang telah diuraikan pada penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur Peran Pemerintah itu merupakan suatu kegiatan atau aktivitas perlu diperhatikan beberapa indikator sebagaimana telah dijelaskan pada teori yaitu sebagai, 1. Peran Pemerintah sebagai Regulator. 2. Peran Pemerintah sebagai Dinamisator. 3. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator. 4. Peran Pemerintah sebagai Katalisator. Arif (Nurdin, 2014:66).

Pemerintah Desa

Mengenai Pemerintahan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memerintah atau segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara Sementara itu Tandjung mendefinisikan pemerintahan adalah sebagai jawatan atau alat-alat kelengkapan Negara yang mempunyai wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat, berproses atau sedang berproses menurut suatu cara dan metode tertentu, melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.

Menurut Raharjo (2021:13) yang berpendapat arti lengkap "Pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah dalam segala urusan yang dilakukan oleh negara sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat (selaku penduduk suatu negara, orang kebanyakan, orang biasa: pasukan (bala tentara): anak buah, bawahan) dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat (sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama) dan kepentingan negara (kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya)".

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, makna desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Sementara itu, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Banjir

Banjir dalam pengertian umum adalah debit aliran air sungai dalam jumlah yang tinggi, atau debit aliran air di sungai secara relatif lebih besar dari kondisi normal akibat hujan yang turun di hulu atau di suatu tempat tertentu terjadi secara terus menerus, sehingga air tersebut tidak dapat ditampung oleh alur sungai yang ada, maka air melimpah keluar dan menggenangi daerah sekitarnya.

Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang diatas normal, perubahan suhu, tanggul/bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air ditempat lain. Penyebab banjir dan lamanya genangan bukan hanya disebabkan oleh meluapnya air sungai, melainkan oleh kelebihan curah hujan dan fluktuasi muka air laut khususnya dataran aluvial pantai, unit-unit geomorfologi seperti daerah rawa, rawa belakang, dataran banjir,

pertemuansungai dengan dataran aluvial merupakan tempat-tempat rentan banjir.

Penyebab banjir dapat bervariasi, tergantung pada faktor- faktor geografis, iklim, dan manusia. Berikut adalah beberapa penyebab umum banjir:

1. Curah hujan yang tinggi: Curah hujan yang ekstrem, terutama dalam waktu singkat, dapat menyebabkan banjir. Jika curah hujan melebihi kapasitas penyerapan tanah atau kapasitas saluran air, air akan mengalir ke permukaan dan menyebabkan banjir.
2. Sungai yang meluap: Peningkatan aliran sungai akibat curah hujan yang tinggi atau adanya bendungan yang jebol dapat menyebabkan sungai meluap dan membanjiri daerah sekitarnya.
3. Pembangunan yang tidak tepat: Pembangunan yang tidak memperhatikan drainase yang baik atau mengurangi lahan basah dapat menghalangi aliran air dan meningkatkan risiko banjir.
4. Penebangan hutan: Penebangan hutan yang tidak terkontrol dapat mengurangi kemampuan hutan untuk menyerap air hujan, sehingga meningkatkan aliran permukaan yang dapat menyebabkan banjir.
5. Pemadatan tanah: Pemadatan tanah akibat pembangunan perkotaan atau pertanian intensif dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air, sehingga meningkatkan aliran permukaan dan risiko banjir.
6. Pasang surut laut: Di daerah pesisir, pasang surut laut yang tinggi dapat menyebabkan air laut masuk ke daratan dan menyebabkan banjir.
7. Perubahan iklim: Perubahan iklim dapat mempengaruhi pola curah hujan dan suhu, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi risiko banjir.
8. Saluran air yang tersumbat: Saluran air yang tersumbat oleh sampah, lumpur, atau material lainnya dapat menghambat aliran air dan menyebabkan banjir.
9. Tanah yang jenuh air: Jika tanah sudah jenuh air akibat hujan yang berkepanjangan atau kondisi air tanah yang tinggi, air tidak dapat meresap ke dalam tanah dan menyebabkan banjir.

Letak geografis: Beberapa daerah memiliki topografi yang cenderung datar atau rendah, sehingga lebih rentan terhadap banjir. Dalam (Nurhaimi A dan Sri Rahayu, 2014:3) 'Ada dua faktor yang menjadi penyebab terjadinya banjir, yaitu penyebab yang bersifat alami dan penyebab yang bersifat tidak alami (dari aktivitas manusia). Contohnya yang bersifat alami adalah: (a) hujan lebat; (b) pengaruh geografi pada sungai di daerah hulu dan hilir; (c) pengendapan sedimen; (d) sistem jaringan drainase tidak berjalan dengan baik; (e) pasang surut air laut. Kemudian contoh yang bersifat tidak alami (aktivitas manusia) adalah: (a) perubahan daerah pengalihan sungai yang disebabkan karena penggundulan hutan; (b) pembuangan sampah ke sungai; (c) kurangnya terpelihara bangunan pengendali banjir; (d) kurangnya terpelihara alur sungai'.

METODE

Lokasi penelitian yang di ambil adalah pada kantor Desa Pimping Kabupaten Balangan yang beralamat di Jl. Pimping Rt.002 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan kode pos 71661 Provinsi Kalimantan Selatan. Pendekatan metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik dalam penarikan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah 12 orang dan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data memberikan gambaran yang jelas berkaitan dengan pokok masalah serta uji kredibilitas data.

PEMBAHASAN**Peran Pemerintah Desa Pimping dalam Penanggulangan Bencana Banjir pada Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan**

Peran dalam penelitian memiliki kontribusi yang penting dalam keseluruhan proses penelitian. Kolaborasi antara berbagai pihak dengan peran yang berbeda dapat meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian. Peran Pemerintah Desa Pimping dalam Penanggulangan Bencana Banjir pada Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dapat diukur dari beberapa indikator yang relevan berkaitan dengan hasil yang akan diteliti. Untuk lebih jelasnya mengenai penelitian dapat dilihat pada penjasandari hasil observasi peneliti dilapangan.

1. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Fasilitator adalah seseorang atau suatu kelompok yang akan memfasilitasi sebuah pelatihan, yang memiliki peran untuk membantu memudahkan peserta dalam memahami isi atau materi pelatihan.

a. Membantu Mengatasi Masalah

Peran pemerintah desa Pimping dalam membantu mengatasi masalah sudah baik karena pemerintah desa selalu mengupayakan memberikan bantuan untuk mereka yang terdampak banjir dan membagikan langsung kerumah warga dibantu oleh RT.

b. Memfasilitasi Kebutuhan guna Penanganan Banjir

Peran pemerintah desa dalam memfasilitasi kebutuhan guna penanganan banjir pemerintah desa dapat membantu memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk penanganan banjir, melindungi masyarakat dari risiko banjir, dan membangun ketahanan bencana di tingkat lokal. Peran pemerintah Desa Pimping dalam memfasilitasi kebutuhan guna penanganan banjir cukup baik karena mereka memeiliki rencana dalam pembangunan infrastruktur jalan walaupun belum dapat dilaksanakan karena harus mempertimbangkan anggaran berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM Des.

2. Peran Pemerintah sebagai Dinamisator

Dinamisator adalah sosok atau entitas yang bertindak sebagai penggerak utama dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan pembangunan, memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif, serta mendorong inovasi dan kreativitas dalam upaya pembangunan desa.

a. Sebagai Agen Mempercepat Perubahan

Sebagai agen mempercepat perubahan, Pemerintah Desa (Pemdes) memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan transformasi positif di tingkat desa. Sebagai agen perubahan, Pemdes bertindak sebagai penggerak utama yang mempercepat proses pembangunan dan perubahan menuju arah yang lebih baik dan berkelanjutan. Peran ini melibatkan berbagai tugas dan tanggung jawab yang harus diemban oleh Pemdes untuk mencapai perubahan yang diinginkan oleh masyarakat desa.

Peran pemerintah desa Pimping sebagai agen mempercepat perubahan kurang baik karena dapat dilihat dari karena upaya penanggulangan banjir belum dapat dilaksanakan dengan baik sehingga perubahan belum dapat dilakukan.

b. Peningkatan Inovasi

Peningkatan inovasi adalah proses di mana suatu organisasi, individu, atau masyarakat secara aktif menciptakan, mengadopsi, dan menerapkan ide-ide baru, metode, atau produk untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, atau nilai tambah dalam berbagai bidang kehidupan.

Peran pemerintah desa Pimping dalam peningkatan inovasi masih kurang baik jika dilihat dari belum terlaksana dengan baik dilihat dari inovasi yang belum dapat ditingkatkan

karenanya program yang ingin mereka jalankan.

3. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pembangunan berkelanjutan. Sebagai fasilitator, pemerintah bertindak sebagai penghubung antara berbagai pemangku kepentingan, menciptakan regulasi yang mendukung investasi dan inovasi, serta memberikan bantuan dan dukungan kepada sektor-sektor yang membutuhkan.

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merujuk pada infrastruktur fisik dan non-fisik yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai aktivitas manusia, baik dalam skala individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Sarana dan prasarana yang ada di desa Pimping masih kurang baik karena belum lengkap jika dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki desa sangat terbatas.

b. Penyediaan Penyuluhan

Penyediaan penyuluhan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman kepada masyarakat tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kesehatan, pertanian, lingkungan, pendidikan, dan topik-topik lain yang relevan. Penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan atau tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Peran pemerintah desa Pimping dalam penyediaan penyuluhan masih kurang baik karena sangat jarang dilakukan, hanya satu kali dalam setahun pernah dilakukan yaitu terakhir diadakan pada tanggal 16 Maret 2024 oleh dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Balangan.

4. Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator merupakan peran yang bertujuan untuk merangsang, mempercepat, dan memfasilitasi proses pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan inovasi. Sebagai katalisator, pemerintah bertindak sebagai agen perubahan yang mendorong terciptanya transformasi positif dalam berbagai sektor dan memobilisasi berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama.

a. Respon berbagai Keluhan

Respon berbagai keluhan pemerintah desa Pimping sudah baik karena pemerintah desa selalu mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat dan berusaha untuk merencanakan pembangunan dalam penanggulangan bencana banjir.

b. Koordinasi Multi Pihak

Koordinasi multi-pihak merupakan proses di mana berbagai pihak atau pemangku kepentingan yang berbeda bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan masalah yang kompleks. Koordinasi ini melibatkan kolaborasi, komunikasi, dan kerjasama antara berbagai entitas yang memiliki kepentingan dan peran yang berbeda dalam suatu inisiatif atau proyek.

Koordinasi multi pihak antara pemerintah desa Pimping sudah baik karena pemerintah desa Pimping sudah berkoordinasi langsung dengan masyarakat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Balangan bahkan UPTD Puskesmas dalam penanggulangan bencana banjir.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Desa Pimping dalam Penanggulangan Bencana Banjir pada Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan

1. Faktor Pendukung

a. Tanggung Jawab Sosial

Bahwa peran pemerintah desa Pimping dalam membantu mengatasi masalah sudah baik karena sejauh ini pemerintah desanya selalu mengusahakan pembangunan dalam penanggulangan bencana banjir.

b. Penguatan Kualitas Pelayanan

Pemerintah desa Pimping dalam koordinasi multi pihak sudah berjalan dengan baik jika dilihat dari mereka yang selalu melibatkan masyarakat dan dinas terkait yaitu dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan dalam penanggulangan bencana banjir.

2. Faktor Penghambat

a. Keterbatasan Anggaran

Fasilitas kebutuhan guna penanggulangan banjir di desa Pimping belum cukup baik karena dilihat dari fasilitas jalan dan alat-alat pendeteksi banjir belum memadai.

b. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Penyediaan penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah desa Pimping kurang baik karena penyuluhan sangat jarang dilaksanakan hanya beberapa kali pernah diadakan karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan tersebut sehingga pemerintah desanya juga malas melakukan kegiatan penyuluhan.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa Pimping Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Pada Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan belum optimal terlihat dari indikator. *Pertama*, dari sub variabel regulator membantu mengatasi masalah sudah berjalan optimal. *Kedua*, sub variabel regulator dengan indikator memfasilitasi kebutuhan guna penanganan banjir belum optimal untuk penanganan banjir tersebut. *Ketiga*, sub variabel dinamisator dengan indikator sebagai agen mempercepat perubahan pemerintah desa belum optimal dan belum maksimal dapat dilaksanakan. *Keempat*, sub variabel dinamisator dengan indikator sebagai peningkatan inovasi belum optimal karena terlaksana dengan baik. *Kelima*, sub variabel fasilitator dengan indikator sebagai sarana dan prasarana belum optimal karena pembangunan di desa belum terlaksana dengan baik. *Keenam*, sub variabel fasilitator dengan indikator sebagai penyediaan penyuluhan belum optimal karena penyuluhan sangat jarang dilaksanakan. *Ketujuh*, sub variabel katalisator dengan indikator sebagai respon berbagai keluhan sudah optimal karena pemerintah desa selalu menampung berbagai keluhan masyarakat. *Kedelapan*, sub variabel katalisator dengan indikator koordinasi multi pihak sudah optimal karena pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat. Faktor pendukung antara lain : tanggung jawab sosial dan penguatan kualitas pelayanan. Faktor penghambat yaitu : Keterbatasan anggaran kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Disarankan Kepada Kepala Desa Pimping agar dapat membuat perencanaan dengan memaksimalkan anggaran yang ada untuk nanggulangan bencana banjir. Koordinasikan langkah-langkah penanggulangan secara terpadu dan terkoordinasi agar banjir di desa Pimping dapat teratasi. Kepada Kasi Kesejahteraan agar lebih memaksimalkan peranannya dan Kepada masyarakat penting memiliki kesadaran akan risiko banjir dan dampaknya bagi kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 *Tentang Penanggulangan Bencana Banjir*.
- Anonim. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 *Tentang Penanggulangan Bencana*.
- Anggara, Sahya. 2016. *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bungin, Burhan. 2013. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta Kencana:Pustaka Belajar. Badan
- Keban T Yeremias. 2017. *Enam dimensi strategis administrasi publik: Konsep, teori dan isu*. Yogyakarta:Gava Media 2017.
- Anjasmari, N.M.M. (2022) ‘Pelayanan Kesehatan Pasien BPJS Rawat Jalan Pada Puskesmas Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong’.
- Anjasmari, N.M.M. (2023) ‘KINERJA PEGAWAI PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2163–2171.
- Anshari, M.R. (2023) ‘ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KECAMATAN SUNGAI TABUKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *Cross-border*, 6(1), pp. 28–41.
- Arlan, A.S. and Aida, N. (2023) ‘Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah’, *Administratus*, 7(2), pp. 38–53.
- Febriadi, H. (2022) ‘KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU LANGSUNG DI INDONESIA’, *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 34–41.
- Hidayatullah, G.M. (2024) ‘PENERAPAN PELAYANAN PRIMA PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1219–1229.
- Muhammad Hidayatullah, G. (2021) ‘Pelayanan Isbat Nikah Wilayah Kerja Kantor Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1b Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Jurnal Niara*, 14(3), pp. 213–223. Available at: <https://doi.org/10.31849/niara.v14i3.7384>.
- Noorrahman, M.F., Rizal, M. and Sairin, M. (2022) ‘Peran Administrasi Publik dalam Meningkatkan Kinerja dalam Aspek Kepuasan Kerja pada Pejabat Struktural Akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai Kabupaten Hulu Sungai’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(1), pp. 155–163.
- Noorrahman, M.F. and Sairin, M. (2023) ‘ANALISIS KINERJA PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA UPT PUSKESMAS RAWAT INAP DANAU PANGGANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5475–5481.
- Paulina, S. (2021) ‘KUALITAS PELAYANAN PENCATATAN NIKAH DIKANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PARINGIN PADA MASA PANDEMI COVID 19’, *Al’iidara Balad*, 3(2), pp. 27–39.
- Paulina, S. (2023) ‘PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI PERNIKAHAN DIKANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5431–5439.
- Rifani, J. and Febriadi, H. (2021) ‘KUALITAS PELAYANAN TERHADAP PELANGGAN PADA PLASA TELKOM AMUNTAI AREA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’,

INOVATIF, 3(1).

Setiawan, I. (2022) 'ANALISIS PELAYANAN IGD DALAM MERAWAT PASIEN SUSPECT CORONA VIRUS DI BLUD PAMBALAH BATUNG AMUNTAI', *Al Iidara Balad*, 4(1), pp. 41–48.

Setiawan, I. and Zannah, R. (2022) 'PELAYANAN REHABILITASI PADA KANTOR BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 22–27.

Urahmah, N. and Andri, A. (2023) 'KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN PASPOR DI UNIT KERJA IMIGRASI KELAS I TPI BANJARMASIN DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(8), pp. 3233–3241.

Raharjo. 2021. *Tata Kelola Organisasi Pemerintahan Desa*.

Soerjono Soekanto, Sosiologi Keluarga, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009).

Poedarminta. 2015. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Absolut.

Nurdin. 2014. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung Di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 66.

Rahayu. 2019. *Kepuasan Kinerja*. Pontianak: Fakultas Teknik Industri.

Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif untuk penelitian yang bersifat; eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif*. Bandung: Alfabeta

Yohana. C, Griandini. D, Muzambeq. S. 2017. *Penerapan Pembuatan Teknik Lubang Biopori Resapan Sebagai Upaya Pengendali Banjir*. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM)*. Vol. 1, No. 2 Desember 2017. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpm/article/view/4870>.

.

.